

Frequently Asked Question (FAQ)

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025

1. Apakah yang dimaksud dengan *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025*?

BSPI 2025 adalah panduan arah kebijakan Bank Indonesia (BI) di bidang sistem pembayaran pada era digital dalam rangka mendukung pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif.

2. Mengapa Bank Indonesia menyusun *BSPI 2025*?

Tren digitalisasi memengaruhi sendi-sendi perekonomian, mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional termasuk di sektor keuangan. Arus digitalisasi masuk secara deras ke Indonesia, dan akan semakin menguat di masa depan. Jika dirancang dengan benar, digitalisasi akan meningkatkan output perekonomian.

Namun, arus digitalisasi yang berlangsung tanpa kendali akan membatasi manfaat terhadap stabilitas makroekonomi dan inklusi ekonomi-keuangan dalam jangka panjang. Tanpa kredibilitas dan integritas yang memadai, kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan akan tergerus.

Bagi Bank Indonesia, arus digitalisasi yang salah arah justru akan mendistorsi peredaran uang, serta mengganggu stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan (SSK).

Bank Indonesia merumuskan *BSPI 2025* yang berorientasi penuh pada upaya membangun ekosistem yang sehat sebagai pemandu perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.

3. Bagaimana langkah Bank Indonesia untuk mewujudkan visi *BSPI 2025*?

Perwujudan visi *BSPI 2025* diimplementasikan melalui lima inisiatif visi *SPI 2025* yaitu: *Open Banking*, Sistem Pembayaran Ritel, Infrastruktur Pasar Keuangan, Data, serta Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan. Lima inisiatif tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 23 *key deliverables*. Implementasi seluruh *key deliverables* tersebut akan dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu *industrial approach*, *regulatory approach*, dan *collaborative approach*.

4. Bagaimana peran Bank Indonesia sebagai regulator di dalam *BSPI 2025*?

Sebagai regulator, Bank Indonesia akan melakukan reformasi khususnya di bidang Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan untuk menjaga struktur ekonomi dan keuangan yang sehat guna pembangunan ekonomi yang *sustainable*. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga melakukan koordinasi kebijakan antar regulator. Terakhir, Bank Indonesia akan melakukan komunikasi dan kolaborasi secara intensif dengan pelaku industri untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kuat dan inklusif bagi perekonomian.

5. Bagaimana koordinasi antar regulator dalam implementasi *BSPI 2025*?

Koordinasi antara regulator dilakukan melalui tukar menukar data dan informasi, riset dan kajian bersama, *policy dialogue*, harmonisasi penyusunan standar dan regulasi, dan kerjasama pengawasan.

6. Apa manfaat BSPI 2025 bagi perekonomian?

Secara umum, BSPI 2025 akan menavigasi proses transformasi ekonomi Indonesia masa depan ke arah digital. Sistem Pembayaran yang lancar akan menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan stabilitas sistem keuangan.

Adapun manfaat BSPI 2025 secara spesifik bagi pelaku ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan inklusi keuangan digital agar layanan sistem pembayaran dan jasa keuangan dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara luas
- b. Meningkatkan digitalisasi perbankan guna memperkuat daya saing perbankan
- c. Meningkatkan daya dukung transaksi pembayaran digital sehingga dapat memfasilitasi transaksi ekonomi berbasis digital

7. Bagaimana BSPI 2025 dapat menjawab tantangan revolusi digital di era Industri 4.0 untuk mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional?

Terdapat 3 tantangan besar dalam revolusi digital yaitu

- a. Munculnya pelaku baru non bank di industri keuangan yang berpotensi menjadi *shadow banking* dan berekskalasi menjadi *bigtech*. Di sisi lain, transformasi digital perbankan di Indonesia relatif tertinggal dan belum merata.
- b. Meningkatnya potensi serangan siber serta ketergantungan terhadap infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan internet yang cenderung sistemik.
- c. Potensi tidak optimalnya data sebagai *new input* dan penyalahgunaan data sebagai aset utama di era digitalisasi.

Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia berupaya menyeimbangkan antara optimalisasi peluang inovasi digital dan mitigasi risiko tantangan yaitu :

- a. BI akan mendorong bank untuk melakukan transformasi digital secara utuh serta *interlink* bank dengan *fintech* agar daya saing tetap terjaga.
- b. Kerangka regulasi, *entry-policy*, pelaporan dan pengawasan akan diselaraskan dengan tuntutan era digital, termasuk aspek pengendalian risiko dan perhatian terhadap kepentingan nasional.
- c. Akseptasi pembayaran digital di masyarakat juga perlu terus diperluas dengan infrastruktur dan instrumen pembayaran retail.

8. Bagaimana BSPI 2025 dapat menjamin keseimbangan antara inovasi dengan perlindungan konsumen, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat?

Melalui Visi 4, keseimbangan antara inovasi dengan perlindungan konsumen, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat diwujudkan melalui penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT), kewajiban keterbukaan data/informasi/bisnis publik, dan penerapan *regtech* dan *supotech* dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan.

9. Bagaimana BSPI 2025 dapat mendorong sekaligus menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara?

Bank Indonesia membuka peluang interoperabilitas infrastruktur dan instrumen sistem pembayaran untuk transaksi *cross-border*, baik dari sisi *back-end* maupun *front-end*. Arah pengembangan standar ISO 20022, baik di BI-RTGS, BI-FAST, maupun BI-SSSS serta pengembangan fitur *multicurrency* pada BI-RTGS merupakan wujud upaya mengefisienkan transaksi *cross-border* sebagaimana juga disarankan oleh CPMI.

Di samping itu, berbagai upaya standardisasi, seperti QRIS dan API, akan dipastikan mengadopsi standar teknis yang menjadi *best practices* di dunia internasional. Kerjasama transaksi internasional dan pertukaran data *cross-border*, baik *inbound* maupun *outbound*, akan didasarkan pada prinsip resiprokalitas.

Bank Indonesia menjamin kepentingan nasional di area sistem pembayaran melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan peluang kerjasama antara entitas bisnis asing dengan mitra domestik. Tata cara ini diperlukan guna memastikan efektivitas pemantauan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia. Langkah ini juga diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh transaksi yang terjadi di wilayah NKRI diproses di dalam negeri menggunakan rupiah sesuai mandat aturan perundang-undangan.

10. Apa yang menjadi langkah konkret dari Bank Indonesia yang telah dilakukan dalam implementasi BSPI 2025?

Salah satu inovasi yang dilakukan Bank Indonesia adalah peluncuran *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) tanggal 17 Agustus 2017 yang berbasis EMVCo untuk menjamin interoperabilitas antar penyelenggara dan instrumen guna mencegah fragmentasi industri.

11. Bagaimana *stance* BSPI 2025 terkait dengan target pemerintah menciptakan 20 unicorn pada tahun 2025?

Secara prinsip BSPI 2025 mendukung Indonesia sebagai energi dan lokomotif ekonomi digital melalui penciptaan 20 *unicorn*. BSPI 2025 juga mendukung Gerakan Nasional 1000 *startup* yang digulirkan pemerintah. Dukungan ini akan diwujudkan melalui :

- a. Pengembangan infrastruktur publik yang mendukung ketersediaan layanan pembayaran secara *real time, seamless*, tersedia 24 jam dan 7 hari (24/7) dengan tingkat keamanan dan efisiensi yang tinggi secara *end to end*. Dalam ekonomi digital, dukungan sistem pembayaran yang efisien, mencakup global dan beroperasi 24/7 merupakan kunci beroperasinya suatu ekosistem ekonomi digital.
- b. Bank Indonesia juga akan membangun Data Hub sebagai infrastruktur publik yang memungkinkan keterbukaan data (*data openness*) dan penggunaannya untuk kepentingan publik. Data dan informasi yang dihasilkan akan terbuka bagi *public* berdasarkan persetujuan pemilik data. Ketersediaan data yang lengkap akan mendorong penciptaan inovasi yang lebih baik.

12. Bagaimana BSPI 2025 dapat menjamin *interlink* antara *fintech* dengan perbankan untuk menghindari risiko *shadow-banking*?

Interlink dapat terwujud apabila masing-masing pihak bersedia membuka data nasabahnya melalui pemanfaatan teknologi API secara terbuka. Bentuk kolaborasi bank dan *fintech* dapat dilakukan diantaranya melalui pola pembiayaan dan pembinaan bank kepada *fintech*. Dalam konteks tersebut, *interlink* bank dan *fintech* dapat memitigasi risiko *shadow banking*.